



POTENSI EKONOMI KAWASAN TIMUR INDONESIA & NORTHREN TERRITORY AUSTRALIA

Dr. Oktovianus Nawa Pau, MM, ABM
Dr. Rolland E. Fanggidae, S.Si, MM
Karmila Dwi Mutia, SE, M.Ak, Akt, CA
Nikson Tameno, SE, M.E



POTENSI EKONOMI KAWASAN TIMUR INDONESIA & NORTHREN TERRITORY AUSTRALIA

**Dr. Oktovianus Nawa Pau, MM.ABM
Dr. Rolland E. Fanggidae, S.Si, MM
Karmila Dwi Mutia, SE. M.Ak, Akt, CA
Nikson Tameno, SE, M.E**

**POTENSI EKONOMI
KAWASAN TIMUR INDONESIA & NORTHREN TERRITORY AUSTRALIA**

Penulis : Dr. Oktovianus Nawa Pau, MM.ABM
Dr. Rolland E. Fanggidae, S.Si, MM
Karmila Dwi Mutia, SE. M.Ak, Akt, CA
Nikson Tamenno, SE, M.E

ISBN : 978-623-329-371-6

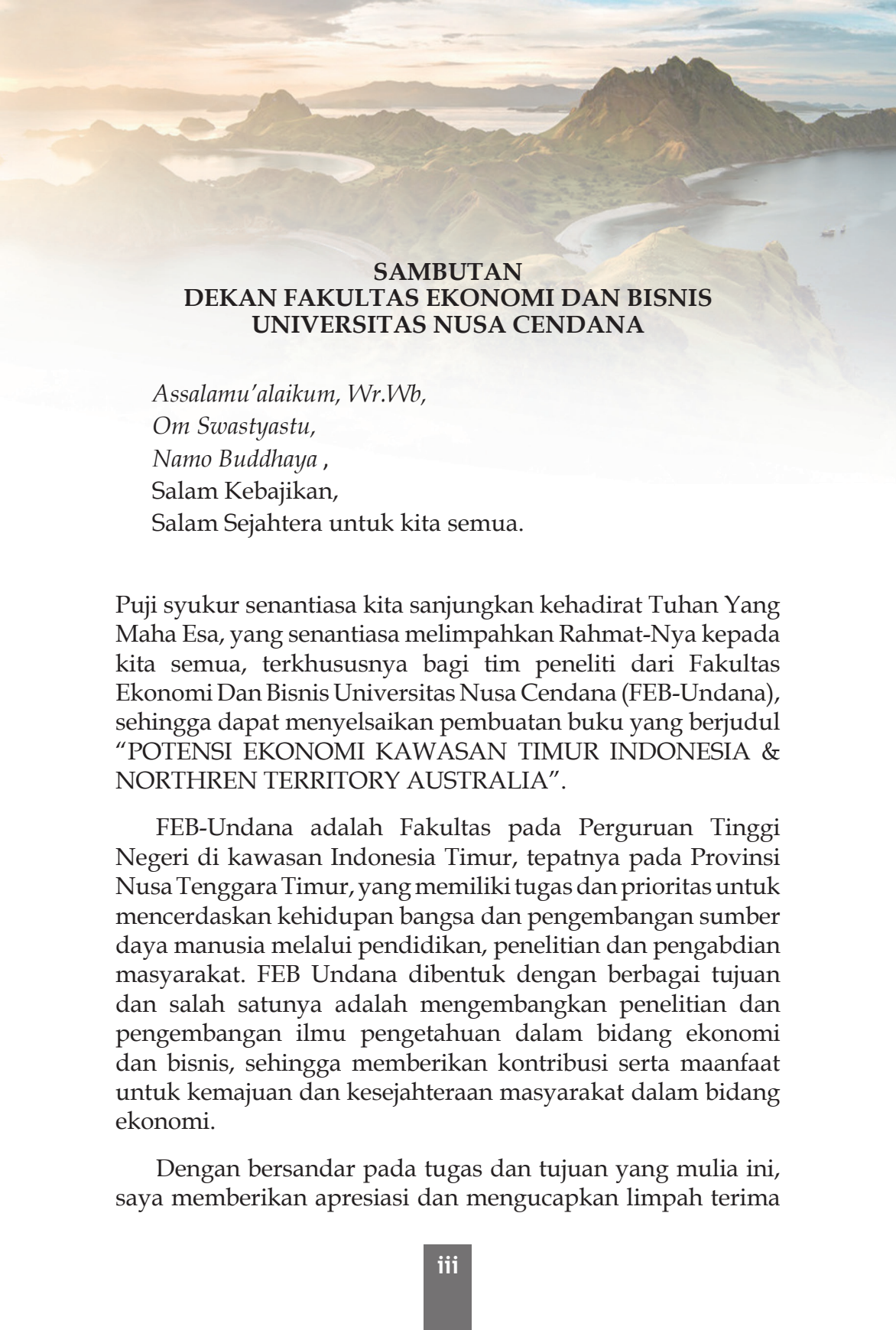
Copyright © September 2021
Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: viii + 66

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi
Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I, September 2021

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



**SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya ,
Salam Kebajikan,
Salam Sejahtera untuk kita semua.*

Puji syukur senantiasa kita sanjungkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, terkhususnya bagi tim peneliti dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana (FEB-Undana), sehingga dapat menyelesaikan pembuatan buku yang berjudul "POTENSI EKONOMI KAWASAN TIMUR INDONESIA & NORTHREN TERRITORY AUSTRALIA".

FEB-Undana adalah Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di kawasan Indonesia Timur, tepatnya pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki tugas dan prioritas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. FEB Undana dibentuk dengan berbagai tujuan dan salah satunya adalah mengembangkan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan bisnis, sehingga memberikan kontribusi serta manfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Dengan bersandar pada tugas dan tujuan yang mulia ini, saya memberikan apresiasi dan mengucapkan limpah terima

kasih kepada Dr. Okvianus Nawa Pau, M.M.,ABM (Alm) bersama seluruh anggota tim (Dr. Rolland E. Fanggalda, MM; Karmila Dwi Mutia, SE. M.Ak, Akt, CA; Nikson Tameno, SE, M.E) yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melakukan riset, dan pada akhirnya menuangkan serta menyusun hasil dari riset tersebut menjadi karya dalam bentuk buku, yang memberi manfaat dalam peningkatan potensi ekonomi pada kawasan Timur Indonesia. Terimakasih sebesar-besarnya khususnya pada pihak Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah bersinergi bersama FEB-Universitas Nusa Cendana .

Besar harapan saya bahwa karya yang mulia ini juga menjadi motivasi bagi para Dosen FEB-Undana untuk mengasilkan karya-karya ilmiah, sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Mengakhiri sambutan ini saya kembali mengucapkan terima kasih yang melimpah kepada seluruh pihak yang telah mempersembahkan karya terakhir Dr. Okvianus Nawa Pau, M.M.,ABM (Alm), melalui keluarga besar Nawa Pau kami menyampaikan terimakasih atas dedikasi dan pengabdianya. Demikian yang dapat saya sampaikan, *Assalamu'alaikum, Wr.Wb, Om Swastyastu, Namu Buddhaya* , Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Dekan FEB Universitas Nusa Cendana

Christien Corina Foenay, SE.,M.Si



KATA PENGANTAR

Laporan Persiapan Lapangan (*Inception Report*) penelitian tentang “Peningkatan Potensi Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dengan Northern Territory Australia”, adalah untuk melaporkan berbagai tahap kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan selama enam bulan (Februari-Agustus 2018). Pada tahap pertama, sejak kontrak kerja ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2018 kami tim peneliti langsung bekerja untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur baik yang menyangkut landasan konseptual-teoritis maupun berbagai studi kasus yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sejauh ini sumber data sekunder yang diperoleh berasal dari berbagai laporan penelitian sebelumnya, Internet, Pendapat para pakar pada dinas-dinas terkait di berbagai media.

Pada tahap kedua, tim peneliti akan melakukan studi lapangan (*fieldstudy*) di Kupang, Dilli Timor Leste dan Darwin Australia yang akan segera dilaksanakan dalam pekan pertama April sampai dengan Agustus 2018. Dalam kegiatan studi lapangan ini kami akan melakukan wawancara dengan berbagai sumber meliputi: 1) para diplomat Republik Indonesia maupun diplomat asing khususnya mereka yang mewakili Tiga negara yang menjadi fokus penelitian ini. 2) Dinas/Instansi pemerintah terkait serta Pelaku dan asosiasi pelaku usaha di tiga negara tersebut diatas. Motivasi utama dalam wawancara ini adalah guna mendapatkan persepsi dan pandangan yang mengarah pada peningkatan hubungan/konektivitas dagang dalam kawasan segitiga Kupang-Dili-Darwin. Dengan ini, kami berharap hasil laporan persiapan lapangan ini bisa

menjadi informasi awal untuk pemantapan keseluruhan proses penelitian ini sebagai laporan kepada penyandang dana (BPPK) Kemenlu RI.

Pada tahap ketiga, peneliti akan menulis draft penelitian lapangan untuk menjadi bahan *fokus group diskusi* yang rencana akan diselenggarakan di Kupang atau Jakarta. Keempat peneliti akan menyusun Laporan Akhir (*Final Report*) yang lebih komprehensif. Tentu saja kami tim peneliti sangat terbuka dan apresiatif terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan terutama dari pihak pertama BPPK kemenlu RI.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami tim peneliti menyampaikan apresiasi dan terimakasih sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah membantu penelitian ini, khususnya pada pihak BPPK Kementerian Luar Negeri RI dan FEB-Universitas Nusa Cendana .

Kupang, Juli 2021

Tim Penulis



DAFTAR ISI

Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I

PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Permasalahan Penelitian.....	10
Tujuan Penelitian	11
Tim Penelitian.....	12
Pembiayaan.....	13

BAB II

ORGANISASI PENELITIAN	15
Tahapan Persiapan Penelitian.....	15
Tahapan Pelaksanaan Penelitian	15
Tahapan Pelaporan.....	17
Tugas Pekerjaan Tim Peneliti.....	18
Narasumber Penelitian.	19
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	21

BAB III

DESAIN DAN METODOLOGI PENELITIAN	25
Kepentingan Kajian	25
Hasil yang Diharapkan	26
Metodologi Penelitian	26

BAB IV

POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI 31
Potensi Sumber Daya Alam..... 31
Potensi Industri Kecil Rumah Tangga. 36
Potensi Perairan Laut..... 36
Potensi Produksi Ikan Di NTT 39
Potensi Perdagangan 42
Potensi Investasi Di NTT 47
Potensi Sumberdaya Manusia..... 48

BAB V

POTENSI KONEKTIVITAS KUPANG-DILI-DARWIN..... 51
Potensi Konektivitas Transportasi..... 51
Kekuatan 53
Kelemahan 53
Peluang..... 53
Ancaman 54

Referensi 57
Profil Tim Peneliti 59
Lampiran 61



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2008 masih dirasakan dampaknya pada perekonomian dunia sampai sepuluh tahun terakhir ini. Terjadinya perlambatan ekonomi karena neraca perdagangan antara negara maju dengan negara berkembang mengalami penurunan. Menjawab hal tersebut, masing-masing negara cenderung melakukan proteksi terhadap ekonominya sehingga semakin menyulitkan keberlanjutan interaksi dengan negara-negara lainnya. Hal tersebut menciptakan masalah baru dalam upaya pemulihan ekonomi dunia sehingga banyak pihak mengeluhkan kondisi tersebut dan menyerukan agar negara-negara lebih terbuka dan melakukan kerja sama bilateral dan regional yang terukur guna menanggulangi krisis yang berlangsung.



Krisis moneter tahun 1997 menyebabkan terjadinya menjarahan dan kerusuhan pada Mei 1998

Sumber: Choo Youn-Kong/ CNN Indonesia (2020)

Dampak dan kelanjutan perundingan *Doha Development Agreement (DDA)* bagi negara anggota *World Trade Organisation (WTO)* masih belum mampu mengatasi hambatan tarif dan proteksi dagang dari setiap anggota WTO. Oleh karena negara-negara anggota WTO terus mencari jalan keluar dengan melakukan kerjasama perdagangan antar negara (*bilateral dan regional*) sebagai upaya terus mendorong arus perdagangan antar negara.

Upaya kerja sama perdagangan bilateral dan regional bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan antar negara sesuai ketentuan yang terdapat di dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)* dan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang merupakan aturan dasar dari WTO. Ketentuan mengenai perdagangan bilateral dan regional diatur di dalam *Pasal 24 GATT 1947* dan *Pasal 5 GATS mengenai Free Trade Agreements (FTA)*.

Perjanjian FTA yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk mengakomodasi perdagangan barang, jasa, dan komoditi lainnya dengan besaran tarif tertentu yang

disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Melalui FTA, negara-negara dapat memaksimalkan potensi perdagangan yang ada di negaranya untuk disalurkan dan mengisi pasar/market negara-negara lainnya. Keberadaan FTA sendiri diyakini berpotensi untuk melampaui efektivitas perjanjian WTO mengingat negara-negara yang berpartisipasi dalam FTA dapat memberikan konsesi yang saling menguntungkan.

Data yang dinotifikasi FTA-WTO sampai 2017, terdapat 172 FTA yang telah dan belum dinotifikasikan, tetapi FTA telah berlaku baru mencapai 97 FTA. Bahwa memang masih banyak FTA yang belum dinotifikasikan akan tetapi telah berlaku di beberapa negara. (**Asia Regional Integration Center** Copyright © 2006–2018, Asian Development Bank. All Rights Reserved.)

Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah lambatnya penyelesaian perundingan dalam DDA di WTO, sehingga banyak negara merasa lebih mendapatkan manfaat dari FTA secara bilateral maupun regional karena lebih mudah dirampungkan dengan jumlah negara yang lebih sedikit dan cukup singkat. Selain itu, banyak negara percaya FTA regional/bilateral lebih menampung keperluan negara masing-masing karena pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut saling berkepentingan.

FTA telah menunjukkan keberhasilannya di beberapa wilayah tertentu. Di kawasan Amerika Utara terdapat NAFTA, di kawasan Eropa Barat terdapat EEC yang saat ini telah berkembang menjadi EU, dan di Asia Tenggara terdapat forum ASEAN yang di dalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan FTA. Selain FTA regional, di tingkat multilateral juga terdapat FTA lainnya seperti GSTP dalam kerangka UNCTAD, HLPO dalam kerangka D-8, maupun FTA bilateral seperti RI-Jepang. Keberadaan FTA di kawasan tertentu menunjukkan korelasi positif dengan perdagangan antar negara yang bebas, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip WTO.

Saat ini Indonesia telah mengimplementasikan dan menandatangani beberapa FTA, antara lain dalam kerangka regional (*ASEAN, Global System of Trade Preferences, Developing-8*) maupun bilateral (*Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement IJEPA*). Selain itu, Indonesia juga sedang melakukan negosiasi FTA secara *bilateral* dengan *European Free Trade Association (EFTA), Korea Selatan, dan Australia*.

Akibat dari banyaknya *Free Trade Agreements* dilakukan antar negara, juga telah membuat inefektivitas, tumpang tindih, dan bahkan terdapat unsur-unsur yang bertentangan. Meski demikian, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan mekanisme tersebut agar dapat memaksimalkan perdagangan dengan negara lain, khususnya di pasar non-tradisional.

Indonesia mempelajari peluang untuk melakukan FTA dengan negara-negara pasar non-tradisional guna meningkatkan perdagangan dan memperluas pasar. Kesamaan posisi dan pandangan sebagai pasar non-tradisional di dunia dapat dijadikan suatu nilai tambah dalam pertimbangan untuk melakukan FTA dengan negara-negara berkembang. Sementara itu, banyaknya ITA tersebut dipandang negatif di Indonesia Mayoritas masyarakat memandang bahwa FTA tersebut membawa kerugian bagi Indonesia sebagaimana kasus yang terjadi pada Perjanjian ASEAN-China FTA. Meski demikian, dengan semakin majunya perjanjian perdagangan bebas di antara negaranegara berkembang, akan terbuka pasar baru bagi Indonesia di luar pasar tradisional yang ada selama ini. Peluang tersebut harus diambil oleh Indonesia dengan kesiapan dan kemampuan dalam negeri untuk melakukan penetrasi.

Kebijakan diambil oleh negara-negara WTO tentunya turut menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2015-2017 dengan rata-rata 5,3%. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lesu, dalam kurun waktu yang sama ekonomi dunia bertumbuh hanya berkisar 3,5%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum melampaui target pemerintah

yakni 6% pertahun. Salah satu penyebabnya tidak tercapainya target tersebut adalah menurunnya perdagangan dunia sehingga banyak negara menerapkan kebijakan proteksi untuk melindungi hasil produksi domestik dan untuk mengurangi resiko dagang dan investasi internasional. Walaupun demikian Indonesia terus melakukan diplomasi ekonomi dan perbaikan sistem investasi sehingga akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan *investment grade*.

Diplomasi ekonomi terus ditingkatkan meskipun dalam kondisi perekonomian dunia yang sedang lesu. Salah satunya dengan peneterasi pasar untuk produk-produk Indonesia terutama ke Afrika, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Selatan. Sebagai contoh pada 2016 peningkatan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara Afrika: Madagaskar meningkat lebih dari 112 persen, Chad meningkat 207 persen, Zimbabwe 223%, Gabon 562 %, Congo 566%, Zambia 637%, dan Rwanda naik 17 kali lipat.

Kementerian Perdagangan RI dalam forum perwakilan dan diplomat RI di Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa telah terjadi peningkatan transaksi secara signifikan dan menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Luar Negeri RI bersama Perwakilan dan diplomat Indonesia yang telah membantu diplomasi ekonomi dan promosi perdagangan RI di berbagai negara dalam Kawasan Asia Pasifik dan Afrika.

Tim kelompok kerja Diplomasi Indonesia dan Perwakilan RI telah memfasilitasi lebih dari 35.000 pelaku usaha Indonesia untuk menangani informasi yang diperlukan sekaligus mengadakan *matchmaking*. Satu hal menonjol dalam diplomasi ekonomi adalah upaya untuk memperkuat kemampuan industri strategis Indonesia. Indonesia telah berhasil menjual produk industri strategis seperti kereta api PT. INKA dan pesawat buatan PT. Dirgantara Indonesia. Bangladesh telah membeli sebanyak 400 gerbong kereta api, 150 sudah dikirim dan 250 gerbong yang sudah ditandatangani kontraknya. Pesawat CN 235 banyak dipakai di beberapa negara Afrika dan investasi produk-produk Indonesia seperti mie instan di Afrika dan juga

di beberapa negara Eropa antara lain di Serbia dengan total nilai investasi 11 juta USD.

Kebijakan Nawacita pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari wilayah pinggiran/perbatasan RI. Kebijakan ini untuk mendorong peningkatan hubungan ekonomi bisnis antara Indonesia-Australia khususnya kawasan timur. Selain itu kebijakan ini juga dapat meningkatkan intensitas kunjungan tidak hanya di tingkat pejabat pemerintah, namun juga pada tingkat swasta, pelaku usaha dan para profesional.

Perjanjian kerjasama dengan Australia yang sudah cukup lama, yakni kemitraan yang dilakukan dalam *Joint Declaration on Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia* sejak tanggal 4 April 2005. Kerjasama dengan Australia sebagai tetangga adalah tidak terelakkan dan bahkan sebelum Deklarasi bersama itu ditandatangani, sudah lebih daripada 150 *Memorandum of Understanding* (MOU) dalam bidang teknis, pendidikan, sosial, ekonomi, finansial dan perdagangan ditandatangani.

Kerjasama pengembangan Ekonomi wilayah kawasan timur Indonesia khususnya provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Northern Territory (NT) Australia telah terjalin melalui MOU yang ditandatangani di Jakarta pada 21 Januari 1992. Kerjasama ini dikenal dengan *Australian Indonesian Development Area* (AIDA) yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Kawasan Timur Indonesia. Data ekspor NT ke Kawasan Timur Indonesia yakni Minyak dan gas serta sapi hidup senilai AUD 420 juta dan biji besi senilai AUD 417 juta. Negara tujuan ekspor NT selain Indonesia adalah RRT dan Jepang.

Indonesia merupakan pintu masuk ke Australia karena itu posisi strategis Indonesia sangat penting bagi negara Australia bukan saja untuk stabilitas keamanan tetapi juga untuk pengembangan kerjasama ekonomi dan perdagangan barang

dan jasa serta pariwisata. Adapun negara ekspor dari NT dan negara Impor ke NT terbaca pada pada tabel 1 dan tabel 2

Tabel 1 Lima Besar Negara ekspor dari NT 2017

Negara	Nilai Ekspor (AU\$m)	Persentase dari Total Nilai Ekspor Keseluruhan (%)
Tiongkok	1.732	32.7
Jepang	1.722	32.5
Indonesia	349	6.6
Thailand	243	4.6
Republik Korea	209	3.9

Sumber : <http://www.kemlu.ac.id>. berita Kemlu 2018

Terbaca dalam tabel 1 bahwa dapat kita simpulkan Indonesia merupakan pasar nomor 3 bagi produk ekspor dari Australia. Sedang dari sisi Indonesia belum bisa menangkap peluang ini khususnya provinsi-provinsi Kawasan timur Indonesia. Sedang dari sisi impor Australia dapat kita baca pada tabel 2 berikut ini, dimana posisi lima besar negara impor ke NT-Australia.

Tabel 2 Lima Besar Negara Impor ke NT Australia 2017

Negara	Nilai Ekspor (AU\$m)	Persentase dari Total Nilai Ekspor Keseluruhan (%)
Malaysia	302	18.0
Thailand	285	17.0
Singapura	195	11.6
Amerika Serikat	182	10.8
Tiongkok	138	8.2

Sumber : <http://www.kemlu.ac.id>. berita Kemlu 2018

Kalau kita membaca dan membandingkan Tabel 1 dan Tabel 2 diatas maka dapat kita simpulkan bahwa Indonesia merupakan pasar ekspor nomor 3 bagi Australia. Sedangkan dari sisi impor ke Australia Indonesia belum masuk lima besar negara yang mengimpor barang dan jasa ke Australia. Hal ini berarti bahwa Indonesia berpotensi untuk meningkatkan ekspor produk barang dan jasa ke Australia karena jarak yang lebih dekat dan hubungan diplomatik yang cukup lama dan yang baik selama ini. Pertanyaannya mengapa Indonesia belum bisa menangkap peluang ini khususnya provinsi-provinsi Kawasan timur Indonesia yang merupakan wilayah perbatasan negara. Pertanyaan ini menjadi pemicu bagi Badan Penelitian Pengkajian dan kebijakan Kemlu RI untuk melakukan penelitian yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana di Kupang.

Refined petroleum yang menjadi komoditas impor terbesar Australia pada tahun 2016 pada faktanya merupakan hasil ekspor dari negara Korea Selatan sebesar 28 % (US\$ 2.89 miliar), Singapura sebesar 26 % (US\$ 2.78 miliar), Jepang sebesar 1,89 % (US\$ 1.89 miliar) dan negara-negara lainnya, sedangkan Indonesia hanya mengirimkan sebesar 1,5 % atau senilai dengan US\$ 1.59 juta. Sementara itu untuk Bijih Besi, Australia membelinya dari Brazil senilai US\$ 27 juta, Argentina senilai US\$ 6.36 juta dan Makedonia senilai US\$ 1.45 juta.

Untuk wilayah Indonesia bagian Timur sendiri, terdapat kebutuhan bagi provinsi- provinsi di kawasan tersebut untuk meningkatkan aktivitas dagangnya dengan Australia. Hal ini juga didukung potensi wilayah Indonesia bagian timur untuk melakukan perdagangan dengan Australia dengan nilai sebesar US\$ 9.6 juta.³ Adapun dari jumlah ekspor tersebut, sebesar 7.27 % berasal dari sektor migas dan 92.79 % dari sektor non-migas, khususnya dari ekspor garam dapur.

Indonesia memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan akan gas alam sebagai bahan baku pupuk dimaksud sekaligus meningkatkan perekonomian Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan konektivitas dengan *Northern*

Territory, Australia. Sebagaimana dimaklumi, pada bulan September 2017, Australia dan Timor Leste akhirnya mencapai kesepakatan mengenai wilayah celah Timor yang merupakan ladang minyak dan gas senilai US\$ 40 miliar.

Celah Timor dan Blok Masela di Maluku Tenggara berlokasi di wilayah 150 kilometer sebelah Tenggara Timor Leste dan 450 kilometer di sebelah Darwin, ibukota Australia Timur. Menurut *Woodside Energy*, ladang minyak dan gas tersebut menyimpan sebanyak 5.13 triliun kubik kaki gas dan 225,9 juta barel minyak mentah, yang mana kepemilikannya saat ini dibagi antara Woodside (33.4 %), Conoco Phillips (30 %), Shell (26.56 %) dan Osaka Gas (10 %).⁵ Celah Timor wilayah *Joint Petroleum Development Area*, yakni area yang berada di antara Timor Leste dan Australia yang mana wilayah ini dipergunakan oleh kedua negara secara bersamaan dengan pembagian 90:10. Saat ini terdapat satu ladang minyak yang beroperasi, yakni Bayu-Undan yang dikelola oleh Conoco Phillips (57 %), Eni (11 %), INPEX (11 %), Tokyo Timur Sea Resources Pty (9 %). Proyek Bayu-Undan ini sendiri sedang memproduksi minyak mentah 20 ribu barel per-hari, gas alam sebanyak 561 juta kubik per-hari dan LPG sebesar 13 ribu barel per-hari.

Pemerintah NTT juga sedang berupaya untuk mendapatkan hak partisipasi (*Participating Interest*) dalam pengelolaan minyak dan gas alam migas celah Timor maupun Blok Masela sebesar lima persen dalam mempercepat pembangunan wilayah NTT. Provinsi NTT berusaha mendapat bagian dari partisipasi interest. Mengingat, NTT menjadi salah satu wilayah yang berdampak langsung dari pengembangan Blok Masela yang letaknya di perairan dekat kepulauan Tanimbar (Kabupaten Maluku Tenggara Barat) dan Kabupaten Alor (NTT). Pemerintah daerah NTT sedang berjuang ke pemerintah pusat (Kementerian ESDM) dengan optimisme akan diputuskan, Maluku dan NTT mendapat partisipasi interest sebesar 10% dan dibagi sama masing-masing lima persen.

Blok Masela merupakan kawasan kilang minyak dan gas bumi yang telah diputuskan sebagai salah satu dari 37 prioritas dalam proyek strategis nasional (PSN), sebagaimana diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor: 58 tahun 2017. Pengelolaan Blok Masela secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman RI. Blok Masela berada di luar wilayah *teritory* daerah pemerintahan Maluku dan NTT sehingga pengelolaan minyak dan gas alam itu semata-mata menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Adapun manfaat dari nilai partisipasi interest bagi NTT adalah jika memperoleh lima persen maka setiap tahun akan mendapat dividen sebagai pendapatan dan masuk ke kas daerah. Juga bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) guna percepatan pembangunan di daerah ini. Apabila pemerintah pusat telah menetapkan partisipasi interest sebesar 10 % setara dengan nilai nominal Rp. 30 triliun, maka akan dibagi sama besarnya dengan NTT. Jadi Maluku memperoleh Rp. 15 triliun dan NTT juga dapat Rp. 15 triliun hak kelola atau hak partisipasi atas Blok Masela.

Potensi-potensi ekonomi tersebut diatas merupakan peluang bisnis bagi Kawasan Timur Indonesia khususnya provinsi NTT yang merupakan provinsi terdekat dari dua Negara tersebut yang mana jarak laut Kupang-darwin yaitu 829km (515 miles) dan jarak darat Kupang-Timor Leste 274km. hal ini dapat menjadi potensi konektivitas bagi ketiga Negara sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan segitiga Kupang-Dili-Darwin.

Permasalahan Penelitian

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan berbagai potensi wilayah Indonesia Timur untuk peningkatan konektivitas serta kerja sama ekonomi dengan negara tetangga NT-Australia dan Timor Leste yaitu pengembangan konektivitas dan

pembangunan *refinery* dari Cera Timor di wilayah Indonesia bagian Timur (NTT) guna memenuhi kebutuhan keamanan energi Indonesia utamanya terkait gas alam untuk bahan baku pupuk. Apakah hal ini *feasible* dan menguntungkan bagi para pihak bersangkutan (Indonesia, Timor Leste dan Australia).

Tujuan Penelitian

Kajian kerjasama ini untuk mengkaji :

1. Potensi pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan bagi Indonesia, Timor Leste dan Australia, karena Australia merupakan negara pengekspor sekaligus pengimpor energi, sama halnya dengan Indonesia. Kendati pada periode ini Australia telah mengekspor 13.638 petajoules energi ke berbagai negara, namun negara ini tetap mengimpor sekitar 2.291 petajoules energy yang terdiri dari minyak mentah, LPG, minyak olah, gas alam dan produk batubara. Dalam bidang energi Indonesia hingga kini masih menjadi pemasok terbesar kebutuhan sehari hari warga Timor Leste. Hingga saat ini indonesia menyediakan 80% pasokan energi setiap tahunnya bagi Timor Leste yang masih dipasok dari BUMN Indonesia, Pertamina.
2. Pengembangan Akses Industri Internasional yang melatar belakangi digagasnya kerjasama bilateral Indonesia-Timor Leste, yaitu untuk mengimplementasikan Deklarasi New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) yang telah dihasilkan pada Pertemuan Tingkat Kepala Negara (Asian African Summit) pada 22-23 April 2015 di Bandung.
3. Mengkaji kerjasama sinergis dengan program Nawacita dan Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintahan Jokowi-JK, dimana terdapat program memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional.

4. Sasaran untuk meningkatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan Selatan-Selatan, serta meningkatnya peran Indonesia dalam forum multilateral seperti WTO dan kerjasama pembangunan selatan-selatan.
5. Untuk mewujudkan komitmen tersebut dalam mapping kerjasama selatan-selatan yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memasukkan Republik Demokratik Timor Leste dalam daftar kerja selatan-selatan,
6. Pemanfaatan pelabuhan di Wilayah Timur Indonesia sebagai jalur transportasi Australia dan Timor leste dengan melakukan kegiatan ekspor impor perlu didalami. Sebagai catatan, Kawasan Indonesia Timur memiliki banyak pelabuhan dengan potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan jalur ekspor dan impor, khususnya ke Australia. Misalnya saja Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki pelabuhan Tenau Kupang yang saat ini dipergunakan sebagai pelabuhan peti kemas dan pelabuhan Ba'a di Rote Ndao yang pada bulan September 2017 lalu mengadakan pembangunan untuk mendukung konektivitas laut Indonesia. Selain itu terdapat juga pelabuhan Saumlaki dan Morotai untuk konektivitas laut domestik. Meskipun demikian, terlepas dari besarnya potensi pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia untuk melayani aktivitas ekspor-impor, Australia masih mengandalkan pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya sebagai jalur Timor Leste maupun Australia dalam mengirimkan ataupun mendatangkan barang ke negaranya.
7. Peningkatan kapasitas pelabuhan di wilayah Indonesia bagian Timur untuk meningkatkan kapasitas bongkar muat dan konektivitas NT, Australia dengan wilayah Indonesia bagian Timur.

Tim Penelitian

Tim peneliti berasal dari Universitas Nusa Cendana dengan supervisi BPPK Kemlu. Dalam hal ini, tim Undana

akan memfokuskan penelitian pada pengembangan kerja sama ekonomi kawasan Indonesia Timur khususnya konektivitas antar wilayah di ketiga negara. Untuk mengantisipasi kebutuhan energi terutama pemenuhan kebutuhan gas bumi untuk bahan baku pupuk, serta potensi-potensi pariwisata dan perdagangan barang dan jasa.

Pembiayaan

Pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Nusa Cendana Kupang dibebankan pada anggaran P3K2 Aspasaf, BPPK Kemlu RI tahun 2018 sesuai dengan kontrak yang disepakati.



BAB II

ORGANISASI PENELITIAN

Tahapan Persiapan Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep dan pemikiran yang telah dirumuskan, maka tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam pekerjaan penelitian ini meliputi:

1. Penyiapan administrasi, dimaksudkan sebagai kegiatan awal yang berkaitan dengan penyiapan kontrak kerja dengan BPPK Kementerian Luar Negeri RI dan mendiskusikan tentang maksud dan arah penelitian tentang Peningkatan Potensi Ekonomi Kawasan Indonesia Timur dengan Northern Territory, Australia.
2. Koordinasi dan diskusi dalam tim peneliti, adalah tahap di mana tim peneliti mendiskusikan perumusan masalah penelitian, tujuan, sasaran, serta metodologi penelitian.
3. Penyusunan jadwal kegiatan, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan Penelitian

1. Pengumpulan Data Primer.

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan semua data, baik data primer maupun sekunder yang diperlukan untuk penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian

ini berupa hasil wawancara mendalam dan FGD dengan *key-informant* atau narasumber utama (para Duta Besar atau diplomat dari Kedutaan 2 negara yaitu Timor Leste dan Australia, Gubernur NTT, Para Bupati Kabupaten Malaka, Manggarai Barat, Rote Ndao, Walikota Kupang, Kepala Dinas Perdagangan, Ketua Kadin, Asosiasi Hotel, perwakilan Maskapai Penerbangan dan para pejabat organik di Direktorat Kementerian Luar Negeri RI yang terkait penelitian, Pakar Ekonomi, Pakar Hubungan International dan Hukum Internasional). Untuk data sekunder penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi literatur dan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data.

Pengolahan data dilakukan dengan mengolah data hasil wawancara dan FGD dan berbagai data sekunder yang relevan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan atau mengonfirmasi pemahaman atas konsep dan data penelitian.

3. Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan laporan penelitian dilakukan mulai dari proses penyusunan desain penelitian hingga kesimpulan penelitian. Isi laporan berupa: latar belakang penelitian, tujuan, permasalahan, temuan data, analisis data, kesimpulan dan rekomendasi.

4. Rekomendasi akan disusun berdasarkan analisis dan kesimpulan hasil penelitian.

Rekomendasi ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian Luar Negeri RI dalam melakukan pembuatan kebijakan pengembangan kemitraan strategis yang dijalin Indonesia khususnya dengan dua negara yaitu Republik Democratic Timor Leste dan Australia.

Tahapan Pelaporan

1. *Inception Report*, ini berisi tentang persiapan pelaksanaan penelitian, metode penelitian, tahapan kegiatan penelitian dan jadwal pelaksanaan serta komposisi pelaksana dan tugas-tugas penelitian yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan ini.
2. *Interim Report*, meliputi pelaporan tentang kemajuan pekerjaan (*progress report*) yang telah dilaksanakan, hasil-hasil awal penelitian berupa penyajian data penelitian yang diarahkan sesuai dengan kebutuhan analisis pada laporan tahap berikutnya.
3. *Final Report*. Laporan ini berisikan hasil penelitian secara keseluruhan, analisis yang mendalam dari data yang telah diolah, disintesis, diinterpretasikan dan penarikan kesimpulan serta sudah diperlengkapi dengan rekomendasi yang elaboratif.



Tugas Pekerjaan Tim Peneliti

Adapun uraian tugas pekerjaan Personil Tim Penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Uraian Pekerjaan Koordinator sekaligus Peneliti Utama:**
 - a. Menyusun dan membuat program kerja dan jadwal kegiatan,
 - b. Melaporkan setiap tahapan kegiatan dengan pemberi tugas,
 - c. Mengoordinasikan, memonitor dan melaporkan pembuatan, Inception Report, Interim Report dan Final Report,
 - d. Melakukan proses pengumpulan data penelitian,
 - e. Mengevaluasi dan menganalisis data penelitian,
 - f. Mengevaluasi draft laporan penelitian,
 - g. dan tugas-tugas lain yang relevan.
2. **Uraian Pekerjaan Anggota Peneliti Utama:**
 - a. Mempersiapkan sistem dan kegiatan administrasi penelitian,
 - b. Mengembangkan sistem kearsipan,
 - c. Menghubungi pihak-pihak yang menjadi narasumber penelitian,
 - d. Menjadwalkan pertemuan untuk wawancara penelitian,
 - e. Menjadwalkan pertemuan untuk FGD,
 - f. Melakukan proses pengumpulan data penelitian,
 - g. Mengevaluasi dan menganalisis data penelitian,
 - h. Mempersiapkan pelaksanaan seminar penelitian,
 - i. Menyusun laporan penelitian,
 - j. dan tugas-tugas lain yang relevan.

Narasumber Penelitian.

Daftar Narasumber penelitian yang disusun dalam *Inception Report* ini merupakan hasil dari proses korespondensi yang dilakukan oleh tim peneliti. Korespondensi yang dimaksud adalah tim peneliti berupaya untuk menghubungi masing-masing narasumber tentang rencana wawancara penelitian dan FGD. Tim peneliti menyampaikan surat permohonan wawancara, TOR dan agenda jadwal wawancara yang akan dilakukan pada bulan April 2018 dan FGD Mei 2018. Pembagian dua

tahapan waktu wawancara dan FGD ini dimaksudkan agar para narasumber diharapkan dapat berkesempatan untuk menerima tim peneliti untuk wawancara dan menghadiri FGD. Perlu dijelaskan pada tahapan ini, tim peneliti dalam proses persiapan pengumpulan data primer penelitian menggunakan beberapa langkah, antara lain dengan menghubungi jaringan akses tim peneliti yang ada di Jakarta, Timor Leste, Australia dan juga sangat dibantu oleh tim dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI. Setelah data akses atau kontak diperoleh, kemudian tim peneliti mengirimkan secara resmi surat permohonan wawancara, undangan FGD dan TOR penelitian baik melalui e-mail, fax, maupun platform kontak lainnya. Daftar narasumber penelitian selengkapnya tersaji dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Narasumber Penelitian Peningkatan Potensi Ekonomi Kawasan Indonesia Timur dengan Northern Territory, Australia					
Daftar Narasumber Penelitian			Daftar Narasumber Penelitian		
No	Narasumber	Posisi	No	Narasumber	Posisi
1	Sahat Sitorus	Duta Besar/ Diplomat Kedutaan Besar Timor Leste	14	Barata Singgih Riwahono	General Manager Angkasa Pura Prov NTT
2	Yohanes K.S. Legowo	Duta Besar/ Diplomat Kedutaan Besar Australia	15	Paul Liyanto	Kepala Kamar dagang Industri
3	Drs. Frans Lebu Raya	Gubernur Prov. NTT	16	Dr. Siswo Pramono	Kepala BPPK- Kemenlu
4	Dr. Jefirtstson R. Riwu Kore,	Walikota Kupang			
5	dr. Stev Bria Seran	Bupati Kabupaten Malaka			
6	Raymundus Fernandez, S.Pt	Bupati Kabupaten TTU			

7	Drs. Agustinus C. Dula	Bupati Kabupaten Manggarai Barat	17	Reynold Arthur Ivan Lay	Ketua Umum BPD HIPMI NTT
8	Drs. Lens Haning, MM	Bupati Kabupaten Rote Ndao	18	Fredi Ongko Saputra	Apindo Prov NTT
9	Drs. Simon Tokan	Kadis Perdagangan Pemprov NTT	19	Apriana Fanggidae, SE, M.Si	Pakar Pariwisata Prov NTT
10	Marius Ardu Jelamu	Kadis Pariwisata Pemprov NTT	20	Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si	Pakar Ekonomi Prov NTT

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian selama 6 (enam) bulan yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2018 dengan menandatangani kontrak kerja penelitian dan berakhir pada tanggal 24 September 2018 dengan menyerahkan Laporan Akhir Penelitian. Keseluruhan jadwal pelaksanaan penelitian mengacu pada setiap tahapan penelitian dengan rincian seperti tertera pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Jadwal Kegiatan penelitian

No	KEGIATAN	BULAN					
		1 (24-03-2018)	2	3	4	5	6 (16-10-2018)
1	MoU Kontrak Kerja						
2	Review TOR dan Persiapan Penelitian Lapangan						
3	Penyusunan Inception Report						
4	Pengumpulan Data #Tahap1						

5	Pengolahan dan Analisis Data						
6	Penyusunan Interim Report						
7	Pengumpulan Data #Tahap2						
8	Seminar Hasil Penelitian						
9	Penyusunan Final Report						

Penjelasan tahap-tahap penelitian ini sbb:

1. Tahap persiapan yang terdiri atas pembuatan proposal, pengumpulan bahan-bahan awal, termasuk dokumen dan narasumber untuk diwawancarai, membuat daftar pertanyaan wawancara dan materi FGD (1 bulan).
2. Tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan data melalui wawancara, pencarian dokumen dan FGD yang diikuti dengan analisis data, dan pembuatan kesimpulan (3 bulan).
3. Tahap penulisan laporan yang diikuti dengan diskusi dan seminar-seminar (2 bulan).

Adapun Iterinary/jadwal kunjungan lapangan seperti terlihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Jadwal kunjungan Lapangan penelitian Peningkatan Potensi Ekonomi Kawasan Indonesia Timur dengan Northern Territory, Australia

Daftar Narasumber Penelitian					
No	Narasumber	Instansi	Jadwal Kunjungan	Lokasi	Keterangan
1	Sahat Sitorus	Duta Besar/ Diplomat Kedutaan Besar Timor Leste	Pertengahan Juli 2015	Dili Timor Leste	
2	Yohanes K.S. Legowo	Duta Besar/ Diplomat Kedutaan Besar Australia	Akhir Agustus 2018	Darwin Australia	
3	Drs. Frans Lebu Raya	Gubernur Prov. NTT	Akhir Agustus 2018	Kupang	
4	Dr. Jefirtstson R. Riwu Kore,	Walikota Kupang	Akhir Agustus 2018	Kupang	
5	dr. Stev Bria Seran	Bupati Kabupaten Malaka	akhir Juli 2018	Kupang	
6	Raymundus Fernandez, S.Pt	Bupati Kabupaten TTU	Jun-18	Kupang	
7	Drs. Agustinus C. Dula	Bupati Kabupaten Manggarai Barat	Jun-18	Kupang	
8	Drs. Lens Haning, MM	Bupati Kabupaten Rote Ndao	Jun-18	Kupang	
9	Drs. Simon Tokan	Kadis Perdagangan Pemprov NTT	Jun-18	Kupang	
10	Marius Ardu Jelamu	Kadis Pariwisata Pemprov NTT	Jun-18	Kupang	
11	Richad Djami	Kadis Perhubungan Pemprov NTT	Jun-18	Kupang	
12	Drs. Paulus B Manehat, M.Si	Kepala Pengelola Perbatasan	Jun-18	Kupang	

13	Ir. Samuel Rebo	Kadis Penanaman Modal dan PTSP Prov. NTT	Jun-18	Kupang	
14	Barata Singgih Riwahono	General Mgr Angkasa Pura Prov NTT	Jun-18	Kupang	
15	Paul Liyanto	Kepala Kamar dagang Industri	Jun-18	Kupang	
16	Ary Mercyano	Manajer Pemasaran Sriwijaya Air	Apr-18	Senior Official Meeting Labuanbajo	Trilateral Meeting
17	Reynold Arthur Ivan Lay	Ketua Umum BPD HIPMI NTT	Jun-18	Kupang	
18	Fredi Ongko Saputra	Apindo Prov NTT	Jul-18	Kupang	
19	Apriana Fanggidae, SE, M.Si	Pakar Pariwisata Prov NTT	Jul-18	Kupang	
20	Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.	Pakar Ekonomi Prov NTT	Jul-18	Kupang	
21	Abed Frans	Association tours and travel agent (ASIT)	Jul-18	Kupang	
22	Prof. Jimmy Pello	Pakar Hubungan International	Jul-18	Kupang	
23	Ir. Noni Banunaek, ST, MT	Pakar Pertambangan	Jul-18	Kupang	



BAB III

DESAIN DAN METODOLOGI PENELITIAN

Kemitraan strategis/komprehensif Indonesia dengan *Northern Territory (NT) Australia* telah terjalin melalui Memorandum Kesepahaman kerja sama Pengembangan Ekonomi. Kerjasama dimaksud dikenal dengan Australia Indonesia Development Area (AIDA), yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di kawasan Timur Indonesia.

Kepentingan Kajian

Kajian potensi pengembangan ekonomi kawasan timur Indonesia dengan *Northern Territory (NT) Australia* ini sangat penting untuk pengembangan aktivitas dan kerjasama ekonomi khususnya wilayah Indonesia Timur. Salah satunya adalah pembangunan *refinery* dari Cela Timor di wilayah Indonesia bagian Timur (NTT), akan memberikan keuntungan bagi Australia yang merupakan negara pengeksport sekaligus pengimpor Energi, sama halnya dengan Indonesia. Selain itu dengan adanya payung kerjasama AIDA dapat memperluas kerjasama dalam bidang kepabeaan. Dalam bidang transportasi keberadaan Pelabuhan Tenau Kupang dan Pelabuhan Ba'a Rote pada jalur kapal Australia dapat menjadi pelabuhan jalur ekspor dan impor maupun konektivitas laut domestik. Keberadaan bandara Eltari dapat menjadi pintu masuk penerbangan internasional Darwin-Kupang dan menjadi bandara konektivitas ke Timor Leste dan daerah lain.

Hasil yang Diharapkan

Beberapa hasil yang diharapkan dari riset ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil riset ini berupa sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi sekaligus masukan bagi para pembuat Kebijakan di Kementerian Luar Negeri RI dalam menilai kerjasama ekonomi yang tengah berjalan.
2. Hasil riset diharapkan juga dapat menjadi referensi dalam melakukan evaluasi terhadap kemitraan strategis Indonesia dalam bidang ekonomi secara efektif.
3. Hasil riset diharapkan mendorong diskusi lebih lanjut untuk merumuskan arah dan input bagi *road map* kerjasama politik luar negeri Indonesia.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan kepentingan kajian dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini, maka desain dan metodologi penelitian dirancang sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan berbagai data, permasalahan, kebijakan dan program- program yang terkait dengan kemitraan strategis/komprehensif Indonesia khususnya dengan *Northern Territory (NT) Australia*.

2. Unit Analisis.

Unit analisis dalam penelitian ini khususnya adalah *actor state* sebagai representasi dari lembaga negara yang memiliki kewenangan langsung (*first hand policy*) dalam kaitannya dengan kebijakan kemitraan strategis/komprehensif Indonesia. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kupang, Dili dan Darwin (untuk pengumpulan data

primer) dengan pertimbangan adalah para narasumber utama penelitian yang memahami permasalahan beraktivitas di tiga kota tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan para narasumber yang terkait dalam pengambil kebijakan dan *stakeholders* yang relevan untuk dapat memperkaya (*enriching*) data penelitian. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan cara membaca dokumen (*documentation study* dan *library research*), mendengar pidato atau membaca teks-teks pidato, berita maupun berbagai laporan (*content analysis*) serta mengkaji dan meneliti berbagai data dan dokumen yang terkait langsung dengan kemitraan strategis/komprehensif Indonesia di kawasan *Northern Territory (NT) Australia*.

4. Kriteria *key informant*/Narasumber.

Penelitian ini didesain untuk mewawancarai narasumber berdasarkan kriteria *key informant* yang terdiri dari birokrasi, para ahli/pakar dan praktisi (aktor/pelaku) baik dari Kementerian Luar Negeri RI atau kementerian lain yang berkaitan dengan topik riset guna mendapatkan *first-hand perspective* dan sumber *central* dalam *decision making process* kebijakan politik luar negeri RI. Selain itu, wawancara akan dilakukan terhadap pakar yang relevan dengan kajian ini. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan data yang dinilai cukup signifikan dan relevan untuk mengetahui efektifitas kemitraan strategis tersebut, baik yang bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

5. Teknik Analisis Data:

- a. **Analisis SWOT** adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi wilayah. Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threads*) merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman berkenaan dengan suatu kegiatan proyek atau usaha (Rangkuty, 2002). Analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) yang merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan pengembangan ekonomi suatu wilayah. Maka perlunya identifikasi terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekutan dan kelemahan yang dimiliki wilayah melalui telaah terhadap lingkungan usaha dan potensi sumber daya wilayah dalam menetapkan sasaran dan merumuskan strategi wilayah yang realistis.
- b. **Analisis Jarak dan Kesempatan Terdekat:** Menurut Supriyadi dan Brata Kusuma, (2005, 124) mengatakan bahwa Analisis jarak dan kesempatan terdekat merupakan salah satu teknik analisis yang cukup penting dalam proses perencanaan wilayah. Analisis jarak yang dituangkan dalam bentuk matriks jarak diperlukan untuk mengukur jarak dari wilayah-wilayah permukiman lainnya yang memungkinkan bagi terlaksananya proses interaksi dari anggota masyarakat.
- c. **Analisis Skalogram:** Menurut Supriyadi dan Brata Kusuma, (2005, 121) bahwa alat analisis skalogram digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada ketersediaan fasilitas perkotaan dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alat analisis scalogram mengelompokkan klasifikasi wilayah

berdasarkan pada tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu:

- 1) Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi (Diferensiasi).
- 2) Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial (Solidaritas).
- 3) Fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi politik (Sentralitas).



BAB IV

POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI

Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan salah satu sektor ekonomi penting, Kekayaan alam, keaneka ragaman flora dan fauna, benda-benda peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya daerah merupakan komponen penting dalam pertumbuhan industri dan pariwisata di Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Timur. Dari sisi ekonomi, pariwisata memberikan dampak positif antara lain adalah menghasilkan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga, distribusi manfaat, kepemilikan dan kontrol; pembangunan serta pendapatan pemerintah. Bahkan pada beberapa daerah pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut dari keterbelakangan menjadi sumber pendapatan utama seperti yang terjadi di Bali. Untuk itu pembangunan pariwisata memiliki arti yang sangat penting ditinjau dari berbagai aspek.



Salah satu kekayaan alam NTT adalah satwa langka Komodo. NTT menjadi satu-satunya rumah bagi kadal zaman purba tersebut di dunia.

Sumber: Sergey Uryadnikov/Kompas.com (2020)

Memperhatikan dampak yang diberikan pariwisata begitu besar maka perlu mengedepankan pariwisata sebagai *leading sector* (sektor utama) pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakat setempat. Keputusan menetapkan pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan tentu dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain adalah Provinsi Nusa Tenggara secara geografis sangat berdekatan dengan Bali dan Nusa Tenggara Barat yang telah menjadi daerah tujuan wisata utama dan pintu masuk utama bagi propinsi Nusa Tenggara Timur dan Flores pada khususnya. Pertimbangan dari segi geografis menjadi satu sisi yang penting bagi penentuan suatu destinasi, akan tetapi itu tidak menjadi faktor determinan. Penentuan pariwisata sebagai sektor unggulan dan bisa menghasilkan devisa tidak terlepas dari Nusa Tenggara Timur yang terletak di wilayah perbatasan Negara Australia dan Timor Leste yang memiliki tempat-tempat wisata alam, seperti:

1. Taman Nasional di Pulau Komodo terletak di Manggarai.
2. Pantai Pede dan waececu di Labuanbajo terletak di Manggarai
3. Taman Laut 17 Pulau di Ruing terletak di Kabupaten

Ngada

4. Danau Kelimutu Ende terletak di Ende
5. Taman Laut Maumere terletak di Sikka
6. Danau Asmara terletak di Flores
7. Taman Laut/Trumbu Karang terletak di Kupang.
8. Pantai Lasiana Terletak di Kupang
9. Pantai Oeasa Semau Terletak di Kupang
10. Pantai Nembrala terletak di Kab Rote Ndao
11. Tanjung Bastian terletak di TTU, dll.

Tahun 2018 Labuhan Bajo di NTT, Toba di Sumatera Utara, Toraja di Sulawesi Selatan dan Mandalika di Lombok NTB, telah ditetapkan sebagai pintu gerbang destinasi utama pariwisata di Indonesia. Dalam pertemuan trilateral antara Indonesia, Timor Leste dan Australia pada tanggal April 2018 di Labuhan Bajo telah diwacanakan pembukaan jalur penerbangan Kupang Darwin Dili untuk mengembangkan pariwisata dan konektivitas ketiga kota tersebut. Pertemuan Trilateral selanjutnya akan di laksanakan di Alice Spring Australia. Selain tempat wisata alam, ada juga tujuan wisata budaya Nusa Tenggara Timur yakni :

1. Prosesi Jumat Agung Larantuka terdapat di Flores Timur
2. Penangkapan Ikan Paus Lamalera terdapat di Flores Timur
3. Tenun Ikat Terdapat di NTT
4. Pasola terdapat di Sumba Barat
5. Kebudayaan Megalitik (Batu) batu Kubur terdapat di Sumba
6. Tiang Batu terdapat di Ngada
7. Tiang Batu Warloka terdapat di Manggarai, dll

Selain itu tempat tersebut juga menampung kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya, kegiatan tersebut antara lain :

1. Pertunjukan Kebudayaan yaitu pertunjukan tari tradisional, musik tradisonal, lagu- lagu daerah, dan

festival seni dan budaya, misalnya lomba tari tradisional, lomba memainkan alat musik tradisional, lomba menyanyi lagu daerah, peragaan busana daerah.

2. Sail Komodo yang diadakan di NTT setiap tahun, Tour the Flores merupakan event internasional yang tentu saja mendatangkan wisatawan manca negara.
3. Informasi Pariwisata dan Pameran Kebudayaan, berupa informasi multimedia di komputer tentang tempat pariwisata dan hasil kebudayaan masing-masing kabupaten dan ruang pajangan yang memajang hasil kerajinan, pakaian adat, alat musik tradisional.
4. Literatur atau Pustaka tentang wisata alam dan budaya, berupa perpustakaan kecil yang berisi buku-buku, brosur, literatur tentang tempat wisata alam dan budaya
5. Rekreasi, tempat tersebut bisa menjadi tempat rekreasi.

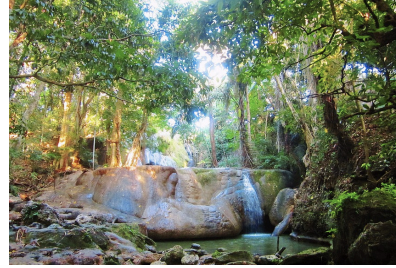
Dengan banyaknya produk pariwisata yang berbeda dimana faktor ini adalah potensi yang membutuhkan penanganan lebih, agar benar-benar dijadikan sesuatu komoditi pariwisata yang akan selalu menjadi primadona serta sumber devisa bagi Nusa Tenggara Timur.

Adapun potensi pariwisata di wilayah perbatasan NTT yang berbatasan dengan Australia maupun Timor Leste adalah kabupaten Kupang. Daerah tujuan wisata di Kabupaten Kupang beserta dengan gambar objek wisata alam adalah sbb:



Taman Ziarah Yesus-Maria,
Oebelo

Sumber: mytrip.co.id



Gambar Air Terjun Oenesu

Sumber: indonesiakaya.com

Tabel 4.1
Objek Pariwisata di Daerah Perbatasan di Kabupaten Kupang

No	Jenis Wisata	Objek Wisata
1	Wisata Alam	Pantai Tablolong Mata Air Baumata Air Terjun Oenesu Pantai Batulesa Air Terjun Tesbatan Hutan dan Mata Air Camplong Pantai Semau Pantai Otan Pantai Uiasa Pantai Hansisi Pulau Kambing Pulau Burung Gunung Batu Tertinggi di Pulau Timor Gunung Fatuleu
2	Wisata Budaya	Rumah Sasando Oebelo Tenun Khas Timor
3	Wisata Religi	Taman Ziarah Yesus Maria Yosef

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTT

Potensi Industri Kecil Rumah Tangga.

Usaha Industri kecil masyarakat NTT yang terkait dengan pariwisata adalah tenun ikat. Tenun dibuat secara tradisional yang dikerjakan oleh sebagian besar perempuan yang memiliki keterampilan menenun yang diwariskan oleh nenek moyang dan diturunkan ke keturunannya. Hampir di semua kecamatan, sebagian besar warga desa mempunyai usaha rumahan membuat kain tenun. Di Kabupaten Kupang terdapat beberapa kelompok tenun ikat diantara kelompok tenun ikat Kai Ne'e di Kelurahan Teunbaun Kecamatan Amarasi Barat dan kelompok tenun ikat di Kecamatan Amfoang Timur.



Motif Tenun Ikat dari Kabupaten Kupang

Potensi Perairan Laut

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan. Dari 21 kabupaten dan satu kota di NTT, semua kabupaten yang berjumlah 21 kabupaten masuk kategori tertinggal. Hanya Kota Kupang yang lolos dari status ketertinggalan. Ada tantangan besar untuk mengelola wilayah kepulauan dan perairan ini yang menuntut biaya besar untuk pengembangan infrastruktur. Di sisi lain, ada juga potensi perairan yang sesungguhnya bisa dijadikan modal untuk mengangkat kesejahteraan di NTT.



Gunung Fatuleu

Sumber: goodnewsfromindonesia.id (2016)

Berdasarkan data Provinsi NTT, luas wilayah daratan sekitar 47.349,9 km², wilayah laut hampir empat kali lipatnya, sekitar 200.000 km². Dengan kondisi seperti ini, sesungguhnya potensi terbesar NTT berada di laut. Apalagi, musim kemarau di NTT sekitar delapan bulan dan empat bulannya musim hujan. Fakta menunjukkan potensi kelautan NTT belum disentuh dengan baik. Bahkan, sebagian terbesar penduduk NTT masih berorientasi ke darat, sehingga yang bekerja sebagai nelayan hanya sekitar 101.522 orang dari 5,1 juta penduduk NTT.

Kekayaan laut NTT sangat besar, bukan saja sebagai penghasil ikan, melainkan juga menawarkan berbagai potensi wisata laut. Saat ini, sesuai data Pemerintah Daerah (Pemda) NTT, ada delapan kawasan konservasi perairan laut di NTT. Pertama, Taman Nasional Laut Sawu (3.517.170 ha) yang meliputi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, dan Manggarai. Kedua, Kawasan Konservasi Laut Daerah Alor (400.008,3 ha) di Kabupaten Alor. Ketiga, Konservasi Perairan Daerah Sikka

(42.250 ha) di Kabupaten Sikka. Keempat, Taman Wisata Alam (TWA) Gugusan Pulau Teluk Maumere (59.450 ha) di Sikka. Kelima, Taman Nasional Komodo (132.572 ha) di Manggarai Barat. Keenam, TWA Tujuh Belas Pulau Riung (9.900 ha) di Ngada. Ketujuh, Cagar Alam Riung (2.000 ha) di Ngada. Kedelapan, TWA Teluk Kupang (5.000 Ha) di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Dari delapan wilayah konservasi ini, Perairan Laut Sawu belum mendapat penetapan dari pemerintah pusat sebagai taman nasional, meski kegiatan konservasi tetap berlangsung di kawasan ini. Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Dermawan, dalam Rakor Taman Nasional Laut Sawu di Kupang pada 1 November mengatakan, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu telah dicadangkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.38/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009, bertepatan dengan kegiatan World Ocean Conference di Manado.

Penetapan Taman Nasional (TN) Laut Sawu sebenarnya sudah pada tahapan finalisasi. Namun, pihaknya tidak mau terburu-buru melakukan penetapan. Ada konsekuensi dan komitmen yang harus dijaga bersama untuk kelangsungan pengelolaan TN Laut Sawu Perairan Laut Sawu merupakan wilayah coral triangle atau wilayah segitiga terumbu karang dan memiliki keanekaragaman hayati laut sangat tinggi. Sesuai hasil survei Reconnaissance tahun 2001-2002, setidaknya ada 336 jenis ikan karang, 31 spesies mamalia laut, terdiri dari 18 spesies paus, 12 spesies lumba-lumba, dan satu jenis dugong. Juga ditemukan enam spesies penyau di Taman Laut Sawu.

Keanekaragaman Laut Sawu tidak lepas dari posisinya di antara Samudra Pasifik dan Hindia, memiliki parit laut dengan

kedalaman yang dapat mencapai lebih dari 2.000 meter. Kombinasi antara arus kuat dan tebing-tebing curam bawah air menjaga karang tetap dingin, serta melindungi karang dari pemutihan selama periode meningkatnya suhu air. Kondisi ini juga membuat habitat laut lebih produktif, menjaga populasi ikan, seperti tuna dalam jumlah besar dan membuat Laut Sawu sebagai “keranjang roti” kawasan Nusa Tenggara.

Potensi Produksi Ikan Di NTT

Perkembangan perikanan didukung potensi panjang garis pantai ± 5.700 Km dan luas laut mencapai 15.141.773,10 Ha. Potensi yang mendukung sektor perikanan adalah Hutan Mangrove seluas $\pm 51.854,83$ Ha (11 Spesies), terumbu karang sebanyak ± 160 jenis dari 17 famili, 42.685 rumah tangga perikanan, 808 Desa/Kelurahan pantai, jumlah 1.105,438 jiwa penduduk pantai, 194,684 orang nelayan ($\pm 9,9$ % dari jumlah Penduduk Desa Pantai) (BPS, NTT Dalam Angka Tahun 2012). Sumber daya laut sangat potensial untuk perikanan tangkap dan budidaya dengan arah pengembangan masing-masing yaitu:

1. Kawasan peruntukkan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota,
2. Pengembangan kawasan minapolitan untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Sabu Timur, Sikka, Lembata, Rote Ndao, Alor, Kota Kupang, dan
3. Pengembangan komoditas garam rakyat di Kabupaten Nagekeo, Ende, Timur Tengah Utara, Kupang, lembata, dan Alor.

Potensi Perikanan tangkap, terdiri dari: Potensi Lestari 388,7 Ton/Tahun; jumlah ikan ekonomis:

1. Ikan pelagis (tuna, cakalang, tenggiri, laying, selar, kembung);

2. Ikan demersal (kerapu, ekor kuning, kakap, bambangan, dll);
3. komoditi lainnya: (lobster, cumi-cumi, kerang darah, dll).

Potensi Perikanan Budidaya, terdiri dari budidaya laut seluas 5.870 Ha (rumput laut, mutiara, kerapu) dengan potensi produksi mencapai 51.500 Ton/Tahun; budidaya air payau seluas 35,455 Ha (udang dan bandeng) dengan potensi produksi mencapai 36.000 Ton/Tahun; budidaya air tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375.

Potensi Budidaya Rumput laut, kabupaten yang budidaya rumput lautnya telah berkembang yaitu: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Komunitas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah *Echeuma CoTonii*, *Eucheuma Sp*, dan alga merah (red algae). Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 250.000 Ton Kering/Tahun.

Potensi Sumber Daya Garam sangat potensial. Upaya peningkatan produksi garam nasional yang ditargetkan sampai tahun 2014 untuk mencapai swasembada garam di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya mencapai 1,2 juta Ton, maka telah dicanangkan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dengan program ini, akan diberdayakan 119 Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dengan jumlah anggota 939 petambak garam. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui pelaksanaan PUGAR menargetkan peningkatan produktivitas lahan garam dari 60 Ton/Ha. Potensi budidaya mutiara tersebar di beberapa kabupaten yaitu kabupaten Kupang: Tanjung Ledo, Pulau Kambing, Tanjung Kabate, Talasa dan Tablolong; Kabupaten Rote Ndao: Kecamatan Rote Barat Daya; Kabupaten Alor: Desa Moru Kec. Alor Barat Daya; Kabupaten Lembata: Teluk Wai Enga dan Lewo Lein; Kabupaten Flores Timur: Teluk Konga, Teluk Lebateta, Selat Solor, Perairan Nanyu Baya, Baniona; Kabupaten Sikka: Labuan

Ndeteh, Desa Nagepanda dan Kabupaten Manggarai Barat: Tanjung Boleng dan Golo Mori.

Kebijakan dan komitmen terhadap Provinsi kepulauan melalui Badan Kerja Sama (BKS) provinsi kepulauan telah menjadikan draft UU Daerah Kepulauan masuk dalam agenda Banleg DPR RI Tahun 2013. Secara substantif, regulasi tersebut akan mendasari pengalihan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Taman Nasional Laut Sawu sebagai kawasan konservasi dari pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini akan menjadi acuan perubahan manajemen dan intervensi pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan pada kawasan laut sekitar yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan petani-nelayan serta masyarakat pesisir. Perkembangan produksi perikanan dan kelautan serta PDRB Sub Sektor perikanan dan kelautan tahun 2012-2013 dasar lihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Produksi Perikanan 2011-2012

No.	Perikanan Budaya	2011	2012	Perkembangan
1	Produksi perikanan budaya	525.208,48	678.183,56	29,13%
	a. Rumah tangga perikanan (KK)	36.194	-	-
	b. Luas tambak (Ha)	1.026,50	1.039,80	13,3%
	c. Luas kolam (Ha)	1.205	1.521	26%
2.	Perusahaan			
	a. Perusahaan pengolahan(unit)	21	21	-
	b. Ekspor hasil perikanan (Ton)	3.112.575	3.164.017	1.6%
Jenis dan Usaha				
a.	Produksi perikanan tangkap (Ton)	102.137	102.170	0,03%
b.	Kapal penangkap ikan (Unit)	12.478	18.549	48,65%

c.	Rumah tangga nelayan (KK)	15.446	17.054	10,41%
d.	Tempat pelelangan/PPI (Unit)	14	14	0%

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT & BPS Provinsi NTT Tahun 2013.

Keterangan : *) adalah angka sementara.

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya mengalami peningkatan dan peningkatan tertinggi disumbangkan oleh perikanan budidaya. Demikian pula perkembangan jumlah kapal penangkapan ikan serta luas lahan untuk usaha budidaya mengalami peningkatan pada tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan pembangunan perikanan dan kelautan.

Potensi perikanan tangkap berupa potensi lestari sumber daya ikan di perairan NTT mencapai 388.700 Ton/Tahun dengan jumlah tangkap yang diperbolehkan mencapai 292.200 Ton/Tahun. Data produksi perikanan tangkap Tahun 2012 menunjukkan tingkat pemanfaatan baru sekitar 34,97%. Selanjutnya luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut seluas 51.870 Ha atau 5% dari garis pantai, dengan potensi produksi sebesar 250.00 Ton Kering/Tahun. Potensi cukup besar baru dimanfaatkan tahun 2010 baru seluas 5.205,70 Ha dengan produksi 1,7 Juta Ton rumput laut basah. Potensi lahan untuk perikanan budidaya air payau seluas 35,455 Ha baru dimanfaatkan sekitar 1.039,80 Ha pada tahun 2012, dan budidaya air tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 1.521,00 Ha.

Potensi Perdagangan

Persaingan bisnis di era perdagangan bebas menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga seolah tidak ada batas antarnegara. Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain di bidang perdagangan, baik negara maju maupun negara berkembang. Perdagangan bebas membuka peluang

bagi produsen Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri dan sebaliknya memberi pilihan produk yang lebih banyak kepada masyarakat. Penganjur perdagangan bebas berargumen bahwa liberalisasi menguntungkan semua negara dan keseluruhan ekonomi di dunia. Setiap negara dapat berkonsentrasi untuk memproduksi barang tertentu dengan seefisien mungkin untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dunia.

Peran pemerintah diharapkan sangat sedikit dalam perdagangan bebas dan seakan-akan 'diharamkan'. Namun demikian, perdagangan bebas antar-negara yang tidak terkontrol oleh peran pemerintah dan negara dapat berakibat pada keadaan dimana pengusaha dalam negeri terutama sektor Usaha Kecil dan Menengah semakin terpuruk karena berkompetisi dengan pengusaha dari negara maju. Untuk itu tetap diperlukan peran pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar semua pelaku usaha dapat tetap bertahan dan bersaing satu sama lain secara sehat.

Sistim perdagangan bebas meminta setiap negara membuka akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama lain. Akses terbuka ini menjadi tertutup jika terjadi ketimpangan teknologi dan informasi perdagangan sehingga dunia usaha negara berkembang seperti Indonesia menjadi dirugikan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dan daya beli yang terus meningkat sehingga menghasilkan potensi pasar yang sangat besar dan menarik minat pelaku usaha di luar negeri untuk masuk dan mengembangkan pasar. Banyak perusahaan baru bermunculan dan para investor asing mulai menanamkan modalnya dan meramaikan kompetisi bisnis di Indonesia. Pengusaha dalam negeri bersaing dengan rekannya dari negara lain. Demikian pula, dalam berbisnis di luar negeri pengusaha Indonesia dapat ikut serta mengambil bagian. Kalau di dalam negeri pengusaha Indonesia sukar bersaing dengan pengusaha asing, maka dalam perdagangan

dengan negara lain akan lebih berat untuk pengusaha Indonesia.

Untuk dapat bersaing pada tingkat perdagangan dunia, maka dunia usaha dalam negeri harus tumbuh kuat. Untuk cepat tumbuh kuat tentu salah satunya diperlukan kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri. Meskipun perdagangan bebas berarti tidak ada batas negara, kebijakan yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia.

Kebijakan yang menguntungkan pengusaha dalam negeri dilakukan oleh negara maju sebagaimana sikap negara industri maju yang secara tidak langsung melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya melalui berbagai isu seperti isu lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain. Menghadapi perdagangan bebas dunia, maka kalangan dunia usaha juga perlu untuk mengambil sikap dalam menjaga keseimbangan dunia usaha dalam negeri dan luar negeri.

Kondisi iklim usaha yang sehat merupakan salah satu faktor kunci yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum memprioritaskan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Sejak lama para pelaku usaha mengeluhkan banyaknya peraturan daerah (perda), baik berupa regulasi perdagangan maupun regulasi non-perdagangan, yang menghambat perkembangan dunia usaha karena memicu timbulnya ekonomi biaya tinggi. Banyak pemda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengenakan berbagai macam pajak dan pungutan lainnya semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memikirkan dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Selain itu, beberapa pemda juga membuat peraturan yang bersifat bukan untuk meningkatkan PAD(non-revenue-raising), seperti pembatasan pasar, kuota perdagangan, penetapan harga, dan pemberian hak istimewa

kepada pelaku usaha tertentu. Tindakan ini pada akhirnya mengakibatkan distorsi pasar. Walaupun Pemerintah Pusat telah menciptakan mekanisme untuk mengontrol timbulnya perda yang mengganggu iklim usaha dengan mengeluarkan UU No. 34/2000 serta menugaskan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk mengawasi perda-perda yang tidak sejalan dengan UU tersebut, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Persoalannya, antara lain bersumber dari ketidakjelasan definisi pajak yang baik (*good tax*). Selain itu, sumber daya yang tersedia di tingkat pusat untuk memeriksa semua perda juga belum memadai.

Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tantangan untuk menciptakan iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain kondisi geografisnya yang sulit, serta keterbatasan dan kualitas infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara), masalah produktivitas tenaga kerja dan rendahnya potensi ekonomi daerah juga kerap kali menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan iklim usaha di Provinsi NTT. Di samping itu, hampir seluruh kabupaten di Provinsi NTT masih menghadapi permasalahan terkait kelembagaan seperti birokrasi, pungutan liar, penegakan hukum, dan perda yang menghambat perkembangan usaha (KPPOD 2005).

Pemda provinsi dan kabupaten/kota di NTT juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang tidak saja menunjang pertumbuhan sektor sekunder dan tersier (pengolahan, perdagangan dan jasa), tetapi juga harus mendukung pembangunan sektor primer, terutama pertanian. Hingga saat ini, sektor pertanian masih menjadi andalan ekonomi NTT karena memberikan kontribusi lebih dari 40% pada produk domestik regional bruto (PDRB) NTT (BPS, 2004) dan menyerap lebih dari 70% tenaga kerja. Meskipun tidak banyak memiliki lahan yang cukup subur, sebagian besar lahan di NTT digunakan untuk sektor pertanian seperti: perkebunan,

tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan. NTT juga mempunyai sumber daya laut yang berlimpah, namun kondisi terumbu karang di beberapa wilayah mengalami kerusakan, sedangkan kebanyakan nelayan lokal masih menggunakan perahu sederhana. Beberapa waktu lalu pemerintah dan organisasi non-Lembaga Penelitian SMERU, Maret 2007 pemerintah juga telah memperkenalkan mata pencaharian alternatif di sektor kelautan, yaitu budidaya rumput laut, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, peran pemda dalam membuat dan melaksanakan kebijakan sangatlah penting dalam rangka memfasilitasi terciptanya iklim usaha yang kondusif, yang dapat meningkatkan volume perdagangan produk pertanian, baik produk mentah maupun produk olahan. Di samping meningkatkan kesejahteraan para petani yang mayoritas miskin, kebijakan tersebut juga diperlukan untuk mengembangkan ekonomi NTT secara keseluruhan. Hingga saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun daerah, komunitas donor, maupun ornop telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan ekonomi NTT. Upaya-upaya tersebut, antara lain melalui pemberian bantuan, seperti: perbaikan teknik bercocok tanam, memperkenalkan komoditas baru, dan memberikan bantuan kredit. Hasil upaya tersebut cukup beragam, tergantung lokasi dan jenis programnya. Sebagian daerah berhasil melaksanakan program tersebut, namun sebagian lagi tidak. Di sisi lain, penelitian mendalam tentang kondisi iklim usaha di NTT belum banyak dilakukan, padahal upaya tersebut sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan tindakan demi membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, dengan cara memperlancar pemasaran hasil-hasil pertanian dan meningkatkan harga yang diterima petani dan produsen.

Potensi Investasi Di NTT

Perkembangan investasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur bergerak dalam sektor-sektor unggulan. Antara lain sektor perikanan dan kelautan, perkebunan, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, perumahan, perhubungan dan pertambangan. Terdapat lebih dari 100 perusahaan yang berinvestasi di NTT untuk mengelola sektor-sektor tersebut diatas. Dalam perjalanan, sebagian investor menghentikan proyeknya sehingga dari 100 investor yang sebelumnya berinvestasi di NTT, kini hanya 65 investor yang menyebar di 16 kabupaten/kota di NTT.

Dari 65 investor tadi, terdapat 34 investor asing dengan realisasi nilai investasi sebesar US\$ 34,7 juta (11,0 %) dari total nilai rencana US\$ 315,5 juta. Sedangkan 31 investor dalam negeri berhasil merealisasikan Rp 677,4 miliar (15,7 %) nilai investasi dari total nilai rencana Rp 4,3 triliun.

Pada umumnya para investor asing berasal dari negara-negara di kawasan Eropa seperti Belanda, Spanyol, Perancis dan Inggris. Sedangkan dari kawasan Asia seperti Jepang, Cina, India, Malaysia, dan Korea. Selebihnya berasal dari Amerika dan Australia.

Sesuai data pada Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak Sembilan investor asing Jepang menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Timur. Ke-9 investor Jepang itu bergerak di sektor perikanan dan industri dengan lokasi operasi di wilayah Kabupaten Kupang (1), Flores Timur (3), Sikka (2), dan Manggarai Barat (3).

Setelah Jepang, Inggris mengerahkan lima investornya dalam sektor pariwisata dan perhubungan. Ke-5 perusahaan asing itu beroperasi di Kota Kupang (1), Kabupaten Rote Ndao (1), Ende (1), Ngada (1), dan Manggarai(1).

Sebagai pesaing Inggris di sector pariwisata, terdapat investor asing asal Amerika melalui PT Puri Naga

Komodo dengan bidang usaha pengembangan wisata yang mengalokasikan dana sebesar US\$ 2,25 juta, Australia menginvestasikan US\$ 200.000 untuk bidang usaha jasa akomodasi melalui PT Cahaya Matahari Terbit di Sumba Timur. Perancis juga menyertakan investasi sebesar US\$ 360.000 untuk bidang usaha yang sama melalui PT Sumba Nusantara Resort dengan realisasi nilai investasi US\$ 278.106 dan PT Jawa Toda Pulau Pantar mengalokasikan US\$ 200.000 dengan realisasi nilai investasi US\$ 563.024 di Kabupaten Alor. Belanda juga membidik sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Barat dan Spanyol di Kabupaten Sikka.

Di sektor jasa telekomunikasi dan industri, Korea menyertakan tiga perusahaan besar, dua di antaranya adalah PT Bukaka Sintel International, dan PT Telkomsel. Keduanya memilih beroperasi di Kota Kupang. PT. Bukaka Sintel International mengalokasikan investasi sebesar US\$ 37,08 juta dengan realisasi nilai investasi sebesar US\$ 21,47 juta. Sedangkan PT Telkomsel US\$ 228,3 juta.

Di sektor perikanan dan kelautan, hingga Desember 2005, Nusa Tenggara Timur telah berhasil mengekspor 133.001 gram mutiara dengan nilai ekspor US\$ 1,3 juta. Sedangkan di dalam negeri terjadi perdagangan rumput laut 320 ton dengan nilai perdagangan Rp 320 juta.

Jika dilakukan perbandingan nilai ekspor Nusa Tenggara Timur pada 2005, perusahaan Penanaman Modal Asing/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) senilai US\$ 20,0 juta dan non PMA/PMDN US\$ 1,7 juta. Di sini bisa dilihat bahwa nilai ekspor PMA/PMDN lebih rendah dari nilai ekspor non PMA/PMDN. Sehingga, hingga Desember 2005, kontribusi PMDN/PMA terhadap ekspor NTT senilai 8,62 %.

Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi sumberdaya tenaga kerja NTT yang dapat diandalkan untuk mendapatkan devisa adalah tenaga kerja keperawatan, tenaga kerja pertanian, peternakan dan

perkebunan. Tenaga kerja pada bidang tersebut banyak dikirim ke negara Asia seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia dan Singapura.



BAB V

POTENSI KONEKTIVITAS KUPANG-DILI-DARWIN

Potensi Konektivitas Transportasi

Kota Kupang dalam statusnya sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki fungsi pengembangan wilayah yang luas, tidak saja dalam tataran wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga dalam tataran regional dan internasional. Hal tersebut tercermin dan ditegaskan dalam kebijakan tata ruang wilayah nasional yang menetapkan Kota Kupang sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional yang terletak di wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kupang mengemban fungsi pengembangan regional yang luas, dan diarahkan agar memiliki fungsi-fungsi pengembangan sebagai berikut:

1. Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
2. Pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
3. Simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
4. Pengembangan daerah tujuan wisata pariwisata

Selain itu dalam kebijakan pengembangan kawasan andalan Kota Kupang termasuk salah satu kawasan andalan

di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kegiatan utama adalah sektor industri, pariwisata dan perikanan laut.

Dengan memperhatikan kondisi dan potensi wilayahnya Kota Kupang memiliki beberapa isu penting dalam pengembangan tata ruangnya antara lain:

1. Pengembangan potensi pesisir dan lautnya belum optimal dilakukan mengingat wilayah pesisir dan laut Kota Kupang memiliki potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut baik potensi perikanan maupun potensi wilayahnya.
2. Perkembangan pembangunan kawasan pesisir kota belum berorientasi pada pembangunan yang memperlakukan kawasan pantai sebagai bagian muka dari kota melainkan masih memperlakukan kawasan pantai sebagai wilayah belakang kota.
3. Ketersediaan air bersih di wilayah kota terutama saat musim kemarau panjang selalu menjadi masalah bagi masyarakat, dimana penyediaan air bersih kota sangat tergantung pada ketersediaan air tanah dalam (sumur bor dan mata air) dan sebagian lain pada ketersediaan air permukaan (embung dan dam).
4. Perkembangan pembangunan kawasan industri Tenau dikawasan Alak dilakukan secara optimal baik dari segi penataan kawasan maupun penyediaan fasilitas pendukung kawasan industri.
5. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi perkotaan seperti prasarana jalan, terminal, sistem perparkiran, sarana pejalan kaki, angkutan umum kota dirasakan belum optimal.

Dalam menyusun kebijakan dan program perlu memperhatikan potensi dan kendala memperhatikan faktor internal Pemerintah dan faktor eksternal di luar Pemerintah, dari hasil diskusi yang telah dilakukan didapat hasil sebagai berikut:

Kekuatan

1. Kota Kupang memiliki posisi sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) mendorong perkembangan Kota Kupang sebagai pusat orientasi baru bagi kawasan sekitarnya terutama yang tergabung dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Sektor jasa dan industri menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tarikan perjalan.
3. Sektor transportasi merupakan *multy player effect* di dalam menunjang sektor lain.
4. Berpindahnya ibukota Kabupaten Kupang ke Oelamasi menimbulkan tarikan dan bangkitan perjalanan harian yang tinggi.

Kelemahan

1. Sulitnya merubah tata guna lahan yang sudah ada menyebabkan sulitnya pengembangan jaringan jalan.
2. Sulitnya menyediakan fasilitas parkir di pusat kegiatan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat pelayanan jalan.
3. Sulitnya memperoleh lahan untuk pengembangan bandar udara dan pelabuhan.
4. Minimnya sumber daya manusia di sektor transportasi.

Peluang

1. Sesuai arah pembangunan nasional maka Kota Kupang menjadi pusat kegiatan nasional yang berfungsi sebagai pusat ekspor import dan pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT.
2. Permintaan terhadap pelayanan transportasi relatif tinggi terutama pada kawasan yang selama ini belum terlayani oleh trayek angkutan umum.

3. Pembangunan infrastruktur transportasi memacu pengembangan wilayah dan sektor lain serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Ancaman

1. Masih relatif rendahnya pendanaan pembangunan dan penyediaan sarana- prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan layanan umum lainnya.
2. Pesatnya permintaan jasa transportasi di masa yang akan datang menimbulkan peningkatan kebutuhan sarana prasarana transportasi.
3. Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi dan sepeda motor akan menimbulkan buruknya kinerja pelayanan jalan.
4. Bertambahnya kelompok usia angkatan kerja yang tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja akan menambah tingkat pengangguran dan kriminalitas.

Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi yang juga merupakan pusat industri dan jasa di Nusa Tenggara Timur maka dukungan sektor transportasi sangat diperlukan untuk memudahkan mobilisasi orang dan barang baik dalam wilayah Kota Kupang maupun ke daerah sekitar.

1. Pengembangan angkutan pepadu moda untuk melayani Bandara El Tari dengan Pelabuhan Laut Tenau dan Pelabuhan Penyeberangan Bolok;
2. Optimalisasi angkutan antarkota dalam provinsi dan pengembangan angkutan penumpang jenis bisnis dan eksekutif;
3. Pengembangan angkutan barang dan petikemas;

Arah pengembangan jaringan transportasi harus dilakukan dengan baik dan komprehensif. Yang dimaksud dengan pengembangan jaringan di sini adalah pengembangan

jaringan infrastruktur maupun pelayanan transportasi. Untuk itu perencanaan arah pengembangan harus dilakukan dengan sistematis. Untuk mencapai hal itu, di bawah ini disampaikan beberapa hal yang harus menjadi acuan bagi pengembangan jaringan transportasi antara lain:

1. Mendukung perkembangan dan pengembangan wilayah;
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri;
3. Mendukung pertumbuhan produksi wilayah; pertanian, perkebunan dan kehutanan;
4. Menstimulasi kawasan kurang berkembang;
5. Integrasi antarwilayah (kecamatan) secara terpadu.

Tataran transportasi pada tingkat kabupaten, provinsi maupun internasional diarahkan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang terintegrasi antara tataran transportasi lokal dengan tataran transportasi wilayah dan tataran transportasi internasional, oleh karena itu dalam pengembangannya harus disertai dengan berbagai kebijakan agar tercipta iklim kondusif untuk mewujudkan tersedianya jaringan prasarana dan pelayanan yang efisien dan efektif dan terintegrasi dalam suatu sistem pelayanan transportasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan pengembangan wilayah dan menumbuhkembangkan serta memacu dan menunjang perekonomian di wilayah Nusa Tenggara Timur.



REFERENSI

Katalog BPS No. 8202010.53, Statistik Ekspor Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur 2016, diunduh dari <https://ntt.bps.go.id/publication/2017/11/13/8a3c01a3258a53a646783c78/statistik-ekspor-impor-provinsi-nusa-tenggara-timur-2016.html> tanggal 04 Maret 2018

<http://www.abc.net.au/news/2017-01-09/east-timor-tears-up-oil-and-gas-treaty-with-australia/8170476> diakses pada tanggal 05 Januari 2018 <https://news.detik.com/australia-plus-abc/d-3626462/australia-dan-timor-leste-capai-kesepakatan-soal-batas-maritim> diakses pada tanggal 12 Maret 2018

<http://www.woodside.com.au/Our-Business/Developing/Pages/Sunrise.aspx#.Wk-CQpeyTIV> diakses tanggal 05 Januari 2018

<https://industry.gov.au/resource/UpstreamPetroleum/Pages/Timor,LeesteandAustraliaJointPetroleumDevelopmentArea.aspx> diakses 12 Maret 2018

¹ <http://www.inpex.co.jp/english/business/australia.html> diakses 12 Maret 2018



PROFIL TIM PENELITIAN

Drs. Oktovianus Nawa Pau, M.ABM.- Merupakan seorang dosen dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang periode 2017-2020. Menamatkan S1 Jurusan Administrasi Niaga, Spesialisasi Keuangan di Undana pada tahun 1985, S2 Ekonomi-Manajemen Agribisnis, UPLB-Philippine tahun 1999, dan S3 Ekonomi-Manajemen Unpad Bandung tahun 2015. Matakuliah Yang diajarkan adalah Sistem Ekonomi Indonesia, Metode penelitian Ekonomi dan Bisnis, Manajemen Keuangan dan Manajemen Lembaga Keuangan. Selain itu juga aktif dalam melakukan berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dr. Rolland Epafra FanggidaE., S.Si-Teol, MM.- dilahirkan di Kupang, 31 Agustus 1984. Merupakan dosen dan Ketua Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Undana. Menamatkan pendidikan S1 Teologi Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2007, S2 Manajemen SDM Universitas Kristen Satya Wacana pada tahun 2009, dan S3 Manajemen SDM Universitas Padjadjaran tahun 2016. Hingga saat ini masih aktif sebagai dosen manajemen konsentrasi SDM dan aktif dalam berbagai penelitian.

Nikson Tameno, S.E,M.E- dilahirkan di Oesao, 1 Januari 1973. Merupakan dosen aktif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Undana untuk Program Studi Ekonomi Pembangunan. Menamatkan pendidikan S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 1997 dan

S2 Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya tahun 2010. Hingga saat ini masih menjadi dosen aktif yang mengasuh matakuliah Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro, Ekonomi Publik dan Keuangan Daerah

Karmila Dwi Lestari Mutia, SE, M.Ak, Akt, CA- dilahirkan di Soe, 7 Maret 1985. Menamatkan pendidikan S1 Akuntansi FE-Universitas Mataram tahun 2007 dan S2 Akuntansi Keuangan dan Auditing Universitas Airlangga tahun 2009. Saat ini masih aktif sebagai dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Undana. Matakuliah yang diasuh adalah Pengantar Akuntansi 1 dan 2, Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan 2, Sistem Informasi Akuntansi, Auditing I dan 2, Audit Keuangan Sektor Publik, Akuntansi UMKM dan Koperasi, Hukum Pajak, Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, Manajemen Perpajakan, Lembaga Keuangan dan Pasar Modal, Manajemen Investasi, Matematika Bisnis, Aplikasi Komputer Akuntansi, Kewirausahaan, Statistik, dan Teori portofolio & pasar modal.

Lampiran 1

Foto Penandatanganan Kontrak dan Kuliah Umum Kemu-FEB Undana



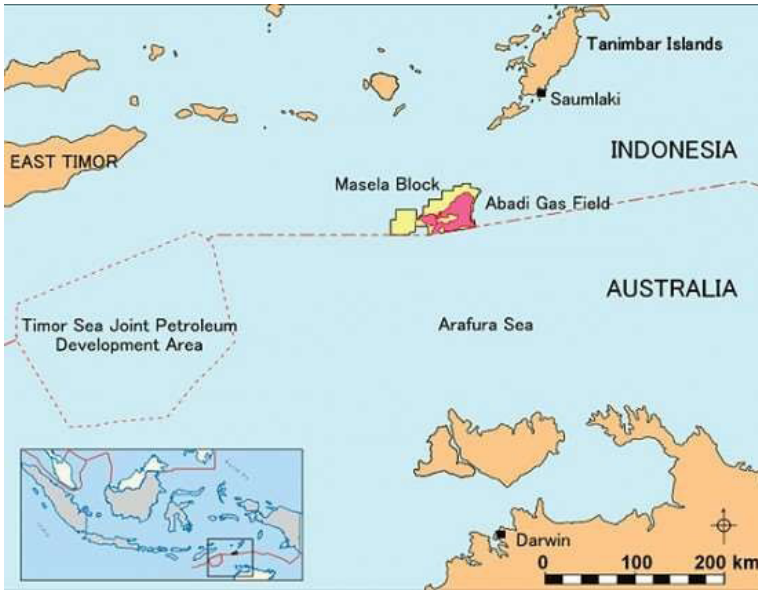
Lampiran 2

Foto Diskusi dan Penyusunan Inception Report Penelitian Peningkatan Potensi Ekonomi Kawasan Indonesia Timur dengan Northern Territory Australia Kerjasama Kemlu RI - FEB Undana



Lampiran 3

Foto wilayah pengembangan Celah Timor Indonesia, Australia dan Timor Leste





Lampiran 4

Foto Eksisting konektivitas transportasi dan perdagangan, Kawasan Timur Indonesia Auatralia dan Timor Leste



POTENSI EKONOMI KAWASAN TIMUR INDONESIA & NORTHREN TERRITORY AUSTRALIA



Laporan Persiapan Lapangan (*Inception Report*) penelitian tentang "Peningkatan Potensi Ekonomi Kawasan Timur Indonesia dengan Northern Territory Australia", adalah untuk melaporkan berbagai tahap kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan selama enam bulan (Februari-Agustus 2018). Pada tahap pertama, sejak kontrak kerja ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2018 kami tim peneliti langsung bekerja untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur baik yang menyangkut landasan konseptual-teoritis maupun berbagai studi kasus yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sejauh ini sumber data sekunder yang diperoleh berasal dari berbagai laporan penelitian sebelumnya, Internet, Pendapat para pakar pada dinas-dinas terkait di berbagai media.

Pada tahap kedua, tim peneliti akan melakukan studi lapangan (*fieldstudy*) di Kupang, Dilli Timor Leste dan Darwin Australia yang akan segera dilaksanakan dalam pekan pertama April sampai dengan Agustus 2018. Dalam kegiatan studi lapangan ini kami akan melakukan wawancara dengan berbagai sumber meliputi: 1) para diplomat Republik Indonesia maupun diplomat asing khususnya mereka yang mewakili Tiga negara yang menjadi fokus penelitian ini. 2) Dinas/Instansi pemerintah terkait serta Pelaku dan asosiasi pelaku usaha di tiga negara tersebut diatas. Motivasi utama dalam wawancara ini adalah guna mendapatkan persepsi dan pandangan yang mengarah pada peningkatan hubungan/konektivitas dagang dalam kawasan segitiga Kupang-Dili-Darwin. Dengan ini, kami berharap hasil laporan persiapan lapangan ini bisa menjadi informasi awal untuk pemantapan keseluruhan proses penelitian ini sebagai laporan kepada penyandang dana (BPPK) Kemenlu RI.

Pada tahap ketiga, peneliti akan menulis draft penelitian lapangan untuk menjadi bahan *fokus group diskusi* yang rencana akan diselenggarakan di Kupang atau Jakarta. Keempat peneliti akan menyusun Laporan Akhir (*Final Report*) yang lebih komprehensif. Tentu saja kami tim peneliti sangat terbuka dan apresiatif terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan terutama dari pihak pertama BPPK kemenlu RI.